

**EVALUASI PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION* (SIKS-NG)
DALAM KEBIJAKAN PENGOLAHAN DATA KEMISKINAN DI DINAS
SOSIAL KABUPATEN PRINGSEWU**

(Skripsi)

Oleh

ALFINKA YUANDA PRATAMA PUTRA

NPM. 2056041009



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASIKESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION* (SIKS-NG) DALAM KEBIJAKAN PENGOLAHAN DATA KEMISKINAN DI DINASSOSIAL KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh :

ALFINKA YUANDA PRATAMA PUTRA

Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait kemiskinan. Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan dengan menggunakan model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Stufflebeam yang dikenal dengan *CIPP Evaluation Model*. CIPP merupakan singkatan dari *Context, Input, Proses, and Product*. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan masih banyak data yang tidak sinkron dan aplikasi sering mengalami maintenance atau eror dalam mengelola data kemiskinan. Dari penelitian tersebut, peneliti merekomendasi agar Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dapat menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk mengukur kinerja pada aplikasi SIKS-NG supaya dapat mempermudah mendeteksi masalah dan memberikan solusi secara cepat dan juga perlu lebih memprioritaskan data kemiskinan dengan meningkatkan enkripsi yang kuat untuk melindungi informasi yang sensitive dan data pribadi supaya tidak terjadi kebocoran data.

Kata Kunci: Evaluasi, Aplikasi SIKS-NG, Pengolahan Data Kemiskinan

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEXT GENERATION SOCIAL WELFARE INFORMATION SYSTEM (SIKS-NG) APPLICATION PROGRAM IN THE POVERTY DATA PROCESSING POLICY IN THE PRINGSEWU DISTRICT SOCIAL OFFICE

By:

ALFINKA YUANDA PRATAMA PUTRA

The Next Generation Social Welfare Information System (SIKS-NG) application is an application designed to assist the process of collecting, analyzing and reporting data related to poverty. This policy is based on the Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Social Welfare Data Management. This research aims to determine the results of implementing the SIKS-NG application program in poverty data processing policies using a decision-making model developed by Stufflebeam, known as the CIPP Evaluation Model. CIPP is an abbreviation for Context, Input, Process, and Product. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The research results show that the implementation of the SIKS-NG application program in the poverty data processing policy at the Pringsewu Regency Social Service is not yet fully optimal in its implementation, because there is still a lot of data that is not synchronized. and the application often experiences maintenance or errors in managing poverty data. From this research, researchers suggest that the Pringsewu District Social Service can establish a regular monitoring and evaluation mechanism to measure performance in the SIKS-NG application so that it can make it easier to detect problems and provide solutions quickly and prioritize poverty data. by increasing strong encryption to protect sensitive information and personal data from data leaks.

Keywords: Evaluation, Application of SIKS-NG, Poverty Data Processing

**EVALUASI PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERATION* (SIKS-NG)
DALAM KEBIJAKAN PENGOLAHAN DATA KEMISKINAN DI DINAS
SOSIAL KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

ALFINKA YUANDA PRATAMA PUTRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : EVALUASI PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) DALAM KEBIJAKAN PENGOLAHAN DATA KEMISKINAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN PRINGSEWU

Nama Mahasiswa : Alfinka Yuanda Pratama Putra

No. Pokok Mahasiswa : 2056041009

Bagian : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Noverman Duadji, M. Si
NIP 196911032001121002

Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP
NIP 1978092320031210011

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara

Meilyana, S.IP., M.A
NIP 197405202001122002

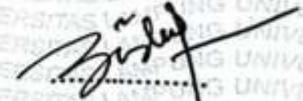
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

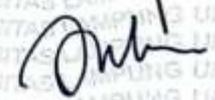
Ketua : Prof. Dr. Noverman Duadji, M. Si



Sekretaris : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP



Penguji Utama : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Juli 2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini muni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 5 Juli 2024

Saya membuat pernyataan,



Ailinka Yudiantama Putra
NPM 2056041009

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Alfinka Yuanda Pratama Putra, dilahirkan dan dibesarkan di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 09 April 2002. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Yuyun Pujianto dan Ibu Tini dan merupakan anak pertama dan memiliki satu orang saudara perempuan, Zivana Aurelia Az Zahra.

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Taruna Jaya Sidoharjo. Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SDN 1 Sidoharjo yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 3 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum di SMA Negeri 1 Gading Rejo yang diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung melalui jalur seleksi SMM PTN- BARAT (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Lampung. Selama dibangku kuliah penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Bagian Administrasi Negara (HIMAGARA) kemudian, pada tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung.

MOTTO

“ Maka Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan “

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

“ Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu sendiri yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan “

(Helen Keller)

“ Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, jangan takut untuk mencoba hal baru karena sesuatu yang baru adalah awal dari suatu perjalanan menuju kesuksesan “

(Alfinka Yuanda Pratama Putra)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tersayang,

Ayahanda Yuyun Pujianto dan Ibunda Tini yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju suksesanku kedepan.
Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Program Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Dalam Kebijakan Pengolahan Data Kemiskinan Di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini diperolehnya saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun pengembangan dan kesempurnaan dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. sebagai dosen sekaligus ketua jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung.
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. sebagai dosen sekaligus sekretaris jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung.

5. Prof, Dr. Noverman Duadji, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan serta nasihat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dukungan dan masukan serta nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
7. Miss Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D, selaku Dosen Pembahas utama yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ibu Afriani Puspita Rini, S. ST, M.Kes selaku Penggerak Swadaya Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
10. Bapak Stepanus Bagus Wicaksono, S.E selaku Penanggungjawab Operator di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu yang telah membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
11. Bapak Rudi Susanto selaku Operator di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu yang telah membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
12. Bapak Ruli Presnawan selaku Operator Layanan aplikasi SIKS-NG yang telah membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini.

13. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak Yuyun Pujianto dan Ibu Tini., serta adikku Zivana Aurelia Az Zahra yang telah memberikan motivasi, dan doa yang selalu melancarkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini, serta menjadi pendorong semangat supaya penulis terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan dapat membahagiakan keluarga
14. Terimakasih untuk Wanda Monica Putri Salsabila yang selalu memberi semangat dan dorongan, mendengarkan keluh kesah penulis, berproses bersama membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu meluangkan waktu kapan saja di saat penulis membutuhkan bantuan maupun masukan.
15. Teman kerja Barbershop Mas Enal, Bayu, Arif, dan Bani yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
16. Teman-teman mahasiswa Jurusan Administrasi Negara atas pertemanan dan kebersamaan dalam menempuh perkuliahan selama ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk menambah wawasan keilmuan khususnya ilmu hukum pidana.

Bandar Lampung, 5 Juli 2024
Penulis

Alfinka Yuanda Pratama Putra

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan tentang Evaluasi Program	9
2.2.1 Pengertian Evaluasi	9
2.2.2 Pengertian Program	11
2.2.3 Pengertian Evaluasi Program.....	12
2.3 Tinjauan tentang Evaluasi Program CIPP	14
2.4 Tinjauan tentang Kebijakan Publik	17
2.4.1 Pengertian Kebijakan Publik	18
2.4.2 Manajemen Kebijakan Publik	18
2.5 Tinjauan tentang Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i> (SIKS-NG)	20
2.6 Tinjauan tentang Kemiskinan.....	23
2.7 Tinjauan tentang Konsep Kesejahteraan	24
2.8 Kerangka Pikir.....	26
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu	36

4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Pringsewu.....	36
4.1.2	Keadaan Penduduk Kabupaten Pringsewu.....	38
4.1.3	Denah Lokasi Kabupaten Pringsewu.....	40
4.2	Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	41
4.2.1	Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	42
4.2.2	Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.....	42
4.2.3	Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.....	44
4.2.4	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	45
4.2.5	Program Prioritas dan Program Pendukung Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.....	46
4.3	Hasil Penelitian	47
4.3.1	Penerapan Program Aplikasi SIKS-NG Dalam Kebijakan Pengolahan Data Kemiskinan.....	48
4.3.1.1	Evaluasi Context	48
4.3.1.2	Evaluasi Input	52
4.3.1.3	Evaluasi Proses	56
4.3.1.4	Evaluasi Product	63
4.3.2	Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Program Aplikasi SIKS-NG dalam Kebijakan Pengolahan Data Kemiskinan.....	66
4.4	Pembahasan.....	68
4.4.1	Penerapan Program Aplikasi SIKS-NG Dalam Kebijakan Pengolahan Data Kemiskinan.....	68
4.4.1.1	Evaluasi Context	68
4.4.1.2	Evaluasi Input	70
4.4.1.3	Evaluasi Proses	72
4.4.1.4	Evaluasi Product	74
4.4.2	Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Program Aplikasi SIKS-NG dalam Kebijakan Pengolahan Data Kemiskinan.....	76
 V. PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Presentase Kemiskinan	4
2. Penelitian Terdahulu.....	8
3. Bagian Evaluasi	29
4. Daftar Informan	32
5. Angka Kemiskinan Kabupaten Pringsewu	38
6. Indikator Kinerja Utama OPD.....	41
7. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	45
8. Pengolahan Bantuan BPNT dan PKH.....	60
9. Penilaian Koin Kepuasan Masyarakat	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tampilan Aplikasi SIKS-NG Kemensos RI	3
2. Kerangka Pemikiran	27
3. Denah Lokasi Kabupaten Pringsewu.....	40
4. Timeline Pengolahan dan Pengusulan Data Kemiskinan	54
5. Alur Penyaluran Bantuan Sosial.....	57
6. Rapat Koordinasi Operator SIKS-NG	64

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Pusat maupun daerah telah bekerja sama dalam mengkoordinasi pengetasan kemiskinan yang ada di Indonesia, diantaranya pemerintah telah melakukan beberapa program yaitu program bantuan sosial atau jaminan sosial untuk keluarga tidak mampu yang telah memenuhi syarat yang ada. Pendataan keluarga tidak mampu juga sudah di atur melalui Kementerian atau Lembaga terkait. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas mengelola data fakir miskin di lingkup nasional, tugas Dinas Sosial Provinsi sebagai pengelolaan data fakir miskin di lingkup provinsi, sedangkan tugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di lingkup Kabupaten/Kota dengan melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam proses verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data yang berkualitas yaitu data yang akurat, lengkap, relevan, dan real sesuai dilapangan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG) yang terintegrasi agar didapatkan data yang berkualitas, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aplikasi manajemen Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) hadir untuk melakukan pengusulan data baru dan perbaikan basis data terpadu masyarakat miskin. Di dalam aplikasi SIKS-NG juga terdapat menu untuk melakukan perbaikan dan pengusulan baru data penerima Bantuan Sosial. Aplikasi ini digunakan untuk menghasilkan data ringkasan atau resume seperti rekapitulasi dan data hasil perbaikan serta pengusulan data baru. Program aplikasi pendataan kesejahteraan social next generation yaitu aplikasi pendataan kemiskinan yang dilaporkan dan selalu update agar bisa melakukan pengawasan sehingga data terverifikasi dengan baik. Hal ini dilakukan agar data kemiskinan bisa terverifikasi dengan aman. Sehingga secara otomatis, penanganan kemiskinan bisa dilakukan dengan baik.

Pemerintah dalam upaya penanganan kemiskinan di Indonesia diantaranya peningkatan ketepatan sasaran data warga miskin telah diterbitkan dua Peraturan Menteri Sosial yang pertama adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2016. Dengan peraturan ini diharapkan penyelenggara dan semua pihak memahami prosedur permintaan data apabila hendak menggunakannya.

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 mengatur berbagai hal terkait verifikasi dan validasi DT PPFM, diantaranya organisasi dan mekanisme pelaksanaan. Dalam Permensos ini ditetapkan bahwa verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Unsur organisasi pelaksana terdiri dari (1) Walikota/Bupati, (2) Dinas Sosial, (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (4) Badan Pusat Statistik, (5) Camat, (6) Kepala Desa atau Kelurahan. Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maka pemerintah daerah termasuk pemerintah desa atau kelurahan tidak boleh lagi menghindar dari tanggungjawab apabila terjadi kesalahan sasaran. Untuk menghindari kesalahan apabila terjadi kesalahan sasaran PPFM pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah membuat suatu program berbasis aplikasi SIKS-NG.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Sosial semakin serius dalam menangani persoalan kemiskinan, hal ini dijelaskan pada saat bimbingan teknis pemutakhiran Basis Data Terpadu Kemiskinan Kabupaten Pringsewu melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bahwa pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Pringsewu akan di lakukan melalui aplikasi SIKS-NG yang akan di operasikan para operator di masing-masing Kecamatan. Aplikasi yang di luncurkan Kementerian Sosial akan di upayakan selalu update, sehingga data dapat dilaporkan akurat dan aman. Aplikasi ini untuk mensinergikan seluruh perangkat yang ada di kabupaten Pringsewu agar dapat melakukan pengawasan bagaimana bentuk penanganan kemiskinan yang berjalan, yang di implementasikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT), namun itu tidak akan berhasil jika tidak ter verifikasi dengan baik.

Tabel 1. Rekapitulasi Persentase Kemiskinan Dari Jumlah Penduduk Melalui Aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Penduduk (KK)	DTKS (Jiwa)	DTKS (KK)	Persentase (%)
1.	Adiluwih	37,528	11,821	17,569	5,723	46.82
2.	Banyumas	22,545	7,153	13,634	4,423	60.47
3.	Gadingrejo	81,372	26,038	46,419	15,361	57.05
4.	Pagelaran	54,390	17,325	31,171	10,189	57.31
5.	Pardasuka	36,832	11,380	25,916	7,993	70.36
6.	Pringsewu	84,789	26,834	39,850	13,046	47.00
7.	Sukoharjo	52,044	16,522	28,903	9,487	55.54
8.	Ambarawa	38,309	12,105	20,208	6,524	52.75
9.	Pagelaran Utara	16,028	4,920	12,021	3,674	75.00
	Grand Total	423,837	134,098	235,691	76,420	55.61

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2023.

Rekapitulasi persentase kemiskinan 55,61% di Kabupaten Pringsewu melalui aplikasi SIKS-NG dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebanyak 235,691 dan jumlah penduduk sebanyak 423,837 tahun 2022. Dari 9 Kecamatan pada Kabupaten Pringsewu persentase kemiskinan paling besar terdapat pada wilayah Kecamatan Pagelaran Utara dengan persentase 75.00% dan Kecamatan Pardasuka dengan persentase 70.36% pada tahun 2022. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pringsewu cukup fluktuatif. Kemiskinan sendiri

dapat diakibatkan dari berbagai faktor diantaranya faktor hambatan struktural, sumber daya manusia, rapuhnya kelembagaan dan faktor kultural lainnya. Faktor penghambat yang sering ditemui dilapangan adalah kurang tepatnya sasaran dalam pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam rekapitulasi data pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan bahwa dalam proses usulan data, verifikasi dan validasi data di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, masih mengalami kendala, baik aplikasi yang sering eror, aplikasi yang sering berubah-ubah, banyaknya data yang harus diperbaiki serta ketidakefektifan pada pengelola data yang hanya dikelola oleh satu orang operator, yang melaksanakan tugas dalam mengupdate dan memperbaiki data yang ada di 9 wilayah kecamatan sekaligus. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam proses pemutakhiran data di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dalam penerapan aplikasi SIKS-NG terkait kebijakan pengolahan data masih ditemukan beberapa permasalahan mulai dari data yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti NIK, nama, dan alamat para Penerima Keluarga Manfaat (KPM) sehingga penyaluran bantuan sosial masih belum tepat sasaran. Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melakukan Pengelolaan data terpadu sebagai bentuk koordinasi dan keseimbangan data dari tingkat Desa, Kabupaten Kota, dan Kementerian Sosial. Penggunaan aplikasi ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 yang mengatur berbagai hal terkait organisasi dan mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu.

Penerapan program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pengelolaan data kemiskinan di Kabupaten Pringsewu masih belum optimal, hal ini terungkap bahwa dari 9 Kecamatan di Kabupaten

Pringsewu yang persentasi pemukhtahiran pada data di atas 60%, ketidakoptimalan, hal tersebut disebabkan pada kemampuan sumber daya manusia dalam pemutakhiran data masyarakat pada petugas pendataan. Data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk penanganan fakir miskin karena datanya sudah terverifikasi dan validasi mulai dari lingkup terkecil yaitu Desa/Kelurahan sehingga sasaran program pemerintah terutama bantuan sosial tepat sasaran.

Berdasarkan keefektifan kebijakan dan sejauh mana tujuan yang dicapai tentang ketepatan sasaran pada pemberian bantuan sosial dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu melalui penerapan program aplikasi SIKS-NG. Penerapan aplikasi SIKS-NG ini sangat diperlukan untuk membantu pengecekan data yang akurat demi tercapainya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal. Pengukuran dan penilaian baik terhadap tahap implementasinya maupun terhadap hasil atau dampak dari bekerjanya suatu kebijakan dan program tertentu sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **“Evaluasi Penerapan Program Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Dalam Kebijakan Pengelolaan Data Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, selanjutnya dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dari penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dari penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai evaluasi penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis yaitu diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dalam upaya mewujudkan kesejahteraan penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan guna mencapai tujuan dan sasaran dalam memberikan bantuan sosial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bagian ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang menjadi sebuah acuan atau rujukan sebagai gambaran. Selain itu juga bermanfaat sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini dan sangat penting sebagai dasar pijakan serta memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah secara sistematis dari segi konsep ataupun teori untuk menyusun penelitian. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan ini tentunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti mengkaji penelitian mengenai Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengolahan Data Kemiskinan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan
Sulistyarini (2020)	<ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa tujuan dan sasaran dari Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah memperlihatkan hasil yang nyata.• Menunjukkan bahwa operator aplikasi SIKS-NG yang belum dapat mengoprasional aplikasi secara maksimal.	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian yang dilakukan Sulistyarini fokus pada meneliti tentang pengaruh manfaat data terpadu kesejahteraan sosial dalam pengentasan kemiskinan.• Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada hasil dari penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengolahan data kemiskinan yang berkualitas.

Wahab (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan bahwa pada keoptimalan program SIKS-NG dalam mengelola data kemiskinan melalui sarana dan prasarana yang harus memadai. • Mengetahui keoptimalan pada penerapan aplikasi SIKS-NG di Dinas Soisal Provinsi Sulawesi Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang dilakukan oleh Wahab Wahab membahas mengenai evaluasi yang dilakukan dalam penerapan SIKS-NG berjalan dengan optimal. • Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengevaluasi terkait hasil kebijakan penerapan SIKS-NG dalam mengelola data kemiskinan.
Noerkaisar (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan bahwa basis data terpadu yang tidak valid menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak efektif, oleh sebab itu pemutakhiran data kemiskinan sangat perlu dilakukan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 5 untuk menghasilkan data yang valid 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang dilakukan oleh Noerkaisar membahas tentang penyaluran bantuan sosial, hal ini karena data masyarakat belum valid, sehingga pengelolaan data kemiskinan sangat perlu untuk memperoleh data yang berkualitas. • Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui data kemiskinan di Kabupaten Pringsewu sudah valid, aktual dan berkualitas.

2.2 Tinjauan tentang Evaluasi Program

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Evaluasi merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya dengan formulasi dan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin dicapai jika siklus mendapat perhatian seimbang dalam hal formulasi, implementasi, evaluasi kebijakan. Hal ini relevan dengan pendapat yang dikemukakan

Lester dan Stewart dalam Suharno (2013) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Sehingga, evaluasi dapat memberikan penilaian dalam arti yang lebih spesifik berdasarkan kriteria atau standar yang objektif, serta evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, menurut Munthe (2015) evaluasi pada proses pengumpulan informasi dilakukan secara lengkap, valid, serta reliable dan tepat waktu supaya informasi tersebut dapat berjalan secara optimal.

Evaluasi adalah mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal ada dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi terus-menerus (*on-going evaluation*) dan evaluasi akhir (*expost evaluation*). Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertentu, misalnya per-triulan atau per-semester selama proses implementasi (biasanya pada akhir phase atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Evaluasi biasanya difokuskan pengidentifikasian kualitas program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.

Kemudian Stufflebeam (1971) juga membedakan *Proaktitive Evaluation* untuk melayani pemegang keputusan, dan *Retroactive Evaluation* untuk keperluan pertanggung jawaban. Evaluasi dapat meliputi dua fungsi, yaitu fungsi formatif, evaluasi yang dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk, dan sebagainya). Fungsi sumatif, yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan.

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Selain menggunakan tes, data, juga dihimpun dengan menggunakan angket, observasi, dan wawancara atau bentuk instrumen lainnya yang sesuai (Mulyadi, 2017). Evaluasi dapat ditujukan pada pelaku suatu aktivitas maupun hasil dari aktivitas yang dilakukan yang demikian akan dihasilkan data tentang kinerja aktivitas yang memuat proses pelaksanaan hingga perubahan yang terjadi setelah suatu aktivitas dilaksanakan.

Berdasarkan dari beberapa definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mengukur atau menilai sebuah rancangan kebijakan atau program yang selanjutnya menyajikan sebuah informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap pengimplementasian sebuah kebijakan atau program.

2.2.2 Pengertian Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelum terlaksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Menurut Saifudin Anshari, program merupakan daftar terinci

mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Wholey, et.al (1994:41) menyatakan bahwa program dapat didefinisikan sebagai seperangkat sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan bersama. Menurut Farida Yusuf Tayibnapi (2013:9) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan program merupakan rangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan. Dalam melaksanakan sebuah program perlu adanya sasaran, manfaat dan tujuan tertentu untuk dapat dikatakan program tersebut berhasil. Biasanya dalam melaksanakan terdapat pengelolaan program berupa perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program.

Berdasarkan dari beberapa definisi program di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dirancang atas dasar sebuah kebutuhan publik dan dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak terbatas demi tercapainya kegiatan implementasi.

2.2.3 Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi program tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Selanjutnya, evaluasi program menurut Musa merupakan suatu kegiatan yang memperoleh pandangan tentang efektivitas dengan keadaan yang objektif secara sistematis dan tujuan yang jelas. Pendapat lain menurut Patricia Rogres (2019) evaluasi program berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang suatu konteks pemograman, kepentingan, serta tujuan yang ingin dicapai supaya menjadi evaluasi yang reponsif terhadap konteks.

Menurut Denzin & Lincol (2000:983) mengemukakan bahwa evaluasi program berorientasi pada sekitar perhatian oleh penentu kebijakan dari penyandang dana secara karakteristik memasukkan pertanyaan penyebab

tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan-keputusan yang diambil dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja atau *assessment performance* pada setiap tahapan evaluasi dalam tiga kategori, yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Berangkat dari pengertian sebelumnya, maka evaluasi program merupakan suatu proses.

Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan. Evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan dengan lingkungan program dengan suatu "*judgement*" apakah program diteruskan, ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, diterima, atau ditolak.

Definisi lebih luas mengenai evaluasi program menurut Adjadan (2015) dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu proses penghimpun informasi secara terstruktur, mendeskripsikan, serta menganalisis data yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan ataupun keputusan yang menjadi bahan untuk mempertimbangkan program tersebut, apakah perlu dibenahi, diakhiri, atau diteruskan. Definisi lain mengenai evaluasi program yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Melalui evaluasi suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat (Putro dalam Hidayah, 2016).

Berdasarkan dari beberapa definisi evaluasi program di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penilaian sebuah kegiatan program guna mengukur tingkat keberhasilan program.

2.3 Tinjauan tentang Evaluasi Program CIPP

Model CIPP terbentuk dari empat dimensi evaluasi yaitu evaluasi Context, Input, Process, dan Product. Keempat evaluasi ini merupakan suatu rangkaian keutuhan, walaupun dalam pelaksanaannya seseorang dapat saja hanya melakukan satu jenis atau kombinasi dari dua atau lebih dimensi evaluasi, namun sesungguhnya kekuatan model terletak dari rangkaian kegiatan keempat jenis evaluasi itu sendiri (Daryanto. 2005). Dalam pandangan Stufflebeam (2003), bahwa tujuan yang paling penting adalah bukan membuktikan, tetapi memperbaiki. “the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not prove but to improve”.

Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dan mengidentifikasi empat tipe keputusan yang diambil, masing-masing tipe keputusan berhubungan dengan tipe atau jenis evaluasi, yaitu:

1. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Context evaluation as a means of servicing planning decisions (to determine objectives); 2) input evaluations these structuring decisions (to design instruction); 3) process evaluations to guide implementing (to use or improve instruction); and 4) product evaluations to serve recycling decisions (to judge products, outputs, or outcomes, Orientasi pada evaluasi konteks adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan obyek, seperti institusi program, populasi, atau perorangan dan untuk menetapkan arah perbaikan. Tujuan dari ini adalah untuk menilai keseluruhan obyek, mengidentifikasi kekurangan, mengidentifikasi kekuatan atau kelebihan yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan.

2. *Input Evaluation* (Evaluasi Input)

Evaluasi input untuk membantu mengambil keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, rencana dan strategi mencapai tujuan, dan juga

bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen-komponen input mencakup sumber daya manusia, materi program dan rancangan aplikasinya, sarana dan peralatan pendukung, dana dan berbagai prosedur serta aturan yang diperlukan.

Evaluasi inputs dilaksanakan untuk menilai alternative pendekatan, rencana tindak, rencana staf, dan pembiayaan bagi kelangsungan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini berguna bagi pembuat kebijakan untuk memilih rancangan, bentuk pembiayaan, alokasi sumber daya, pelaksana dan jadwal kegiatan yang paling sesuai bagi kelangsungan program.

3. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan, sampai sejauhmana rencana telah diterapkan dan apa yang harus direvisi. Komponen-komponen proses meliputi proses pembelajaran dan pelaksanaan program, proses pengelolaan program, dan hambatan manakah yang dijumpai selama pelaksanaan program berlangsung dan perlu diatasi.

Evaluasi process ditujukan untuk menilai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan kemudian akan dapat membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan hasilnya.

4. *Product Evaluation* (Evaluasi Hasil)

Evaluasi produk digunakan untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan, dengan kata lain evaluasi ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Adapun kelebihan dan keterbatasan model ini adalah lebih komprehensif dan keterbatasannya adalah bila diterapkan pada program pembelajaran, mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi.

Evaluasi product dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil yang dicapai, yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, jangka pendek dan jangka panjang baik bagi pelaksana kegiatan agar dapat menfokuskan diri dalam mencapai sasaran program maupun bagi pengguna lainnya dalam menghimpun upaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. (Stufflebeam, 2003)

Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgment mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Stufflebeam (2003) melihat tujuan evaluasi sebagai:

1. Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif,
2. Membantu audience untuk menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan atau obyek, dan
3. Membantu pengembangan kebijakan dan program.

Tujuan evaluasi program model CIPP untuk keperluan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Tujuan utama dari evaluasi CIPP ini berhasil untuk menentukan sampai sejauh mana kurikulum yang telah diterapkan diterapkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Diharapkan hasil evaluasi CIPP memberikan pengaruh pada program baik untuk kedepannya yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi CIPP ini sebagai berikut :

- 1 Memfokuskan evaluasi;
- 2 Mendesain evaluasi;
- 3 Mengumpulkan informasi;
- 4 Menganalisis informasi;
- 5 Melaporkan hasil evaluasi.

2.4 Tinjauan tentang Kebijakan Publik

2.4.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya karena mengingat secara hakiki bahwa pembangunan ini merupakan upaya yang dapat membangun potensi manusia yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan di dalam bidang pembangunan lainnya. Dalam hal ini, kebijakan publik dijadikan sebagai pedoman untuk mengimplementasikan setiap kebijakan yang berpihak dan diperlukan dari semua pihak terutama pada pemerintah yang menyangkut dana atau anggaran.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat berupa sebuah peraturan yang mengikat. Thomas R. Dye (1981) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang diambil pemerintah, baik itu melakukan sesuatu atau tidak apapun sama sekali. Didalam bukunya yang Terkenal *Introducing Public Policy*. Sehingga dapat diartikan bahwa jika melakukan sesuatu adalah suatu keputusan maka tidak melakukan apa pun sama sekali juga dari sebuah keputusan.

Dalam hal ini, Ketika pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan dalam menyelesaikan masalah maka diamnya pemerintah terhadap masalah tersebut juga merupakan sebuah kebijakan, karena pemerintah memilih diam dan tidak melakukan apapun.

Kebijakan publik di buat oleh pelaku kebijakan, pelaku kebijakan itu sendiri ialah orang, sekelompok orang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan pada sebuah organisasi yang mempunyai peran dalam pembuatan kebijakan. Pelaku kebijakan mempunyai peran untuk mempengaruhi setiap proses dalam pembuatan kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi serta perkembangan dalam pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah semua tindakan pemerintah dalamanggapi semua bentuk masalah baik itu melakukan sesuatu maupun tidak melakukan apapun. Dalam pembuatan kebijakan dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan. Pembuatan kebijakan tersebut dilakukan oleh pelaku kebijakan yaitu pemerintah baik itu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

2.4.2 Manajemen Kebijakan Publik

Manajemen merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi dalam proses mencapai tujuan. Didalam proses tentu adanya kerjasama antara orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini manajemen mampu menggerakkan dan mengendalikan sekelompok orang untuk dapat melakukan suatu kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Sehingga begitu juga dalam proses kebijakan publik, manajemen diperlukan agar setiap hal yang direncanakan dapat digerakkan dengan semestinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut Candra dan Rifa'I (2016:16), pengelolaan disebut sebagai manajemen, yaitu to manage yang berarti mengelola. Maksudnya ialah mengelola dalam timbulnya suatu masalah, mengelola proses, apa dan siapa yang mengelola, mengapa harus dikelola dan apa tujuan dari pengelolaan tersebut. Juga mengelola tentang proses mengerakkan semua sarana/alat sumber daya agar berjalan secara efektif dan efisien. Berikut 4 fungsi manajemen yang akan peneliti uraikan di bawah ini ialah:

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah proses menentukan siapa, dan bagaimana sesuatu usaha itu dilaksanakan. Mulai dari menentukan sasaran, prosedur, serta program yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perencanaan juga merupakan proses yang paling penting, sebelum dilakukannya setiap prosesproses yang ada. Dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah baik itu sebuah kebijakan maupun program yang akan dijalankan oleh pemerintah tentu akan melalui proses perencanaan karena dalam perjalanannya perencana dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar acuan dalam mencapai tujuan. Perencanaan mencakup banyak hal baik itu Langkah-langkah yang akan dilakukan sampai proses anggaran sebagai sumber daya dalam mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian ialah proses menempatkan sumber daya yang ada sesuai dengan keahliannya, serta penetapan pembagian kerja dan batas-batasan kerjanya serta menetapkan hubungan setiap unsur-unsur yang ada agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Sumber daya manusia yang tepat merupakan yang sangat penting dalam pelaksanaan setiap program pemerintah, karena dengan sumber daya yang tepat dapat memudahkan proses kerja sama dalam mencapai tujuan. Adapun unsur-unsurnya meliputi: sumber daya manusia, kedudukan, pembagian kerja yang jelas, dan sturktur hubungan kerja sama.

3. Pelaksanaan (Implementasi)

Pelaksanaan ialah tindakan dalam mengerakkan setiap elemen yang ada sesuai dengan yang telah direncanakan pada tahap awal/perencanaan. Pelaksanaan menjadi sesuatu yang sangat penting karena setiap rencana harus dijalankan agar setiap sumber daya yang ada dapat berperan dalam mencapai sebuah tujuan yang ada.

4. Menilai (Evaluasi)

Evaluasi ialah menilai sejauh mana suatu kegiatan atau suatu program dijalankan. Dalam evaluasi jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat dikoreksi atau diluruskan kembali agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Memastikan semua perencanaan yang dirancang berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

2.5 Tinjauan tentang Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG)

Aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi Kementerian Sosial Republik Indonesia yang digunakan untuk perbaikan data dan pengusulan data baru Basis Data Terpadu (BDT). Proses pengisian data dilakukan oleh operator Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Desa melalui aplikasi berbasis offline. Penggunaan aplikasi ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 yang mengatur berbagai hal terkait organisasi dan mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu.

Aplikasi SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (Data Terpadu, Data Bantuan Sosial, dan Data PSKS), yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan (dari desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan aplikasi SIKS-NG ini diharapkan berbagai program bantuan sosial kesejahteraan tepat sasaran, menciptakan data yang akurat dan terverifikasi dengan aman dan meningkatkan kesejahteraan sosial yang optimal.

Menurut Sekjen Kemensos, aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan variabel-variabel yang terdapat pada form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap. Oleh karena itu

akan memudahkan untuk mengintegrasikannya ke dalam Basis Data Terpadu dan seluruh program perlindungan sosial secara nasional. Konteks pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) mengacu pada kemajuan teknologi dan pendekatan baru dalam pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial. Konsep "next generation" pada aplikasi ini mengacu pada beberapa hal yaitu:

1. Aplikasi SIKS-NG dirancang dengan menggunakan teknologi terbaru dalam bidang sistem informasi, seperti cloud computing, big data analytics, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Hal ini memungkinkan aplikasi untuk mengelola volume data besar dengan efisien dan memberikan analisis yang mendalam.
2. Sistem ini dirancang untuk lebih terintegrasi secara internal antara berbagai modul dan fungsi dalam manajemen kesejahteraan sosial. Integrasi yang baik memungkinkan berbagai unit atau departemen dalam organisasi untuk saling berbagi informasi dengan lebih efektif.
3. Dengan kemampuan analisis data yang lebih baik, aplikasi ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan sosial yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Implementasi SIKS-NG diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Proses permohonan, pemantauan, dan evaluasi program-program kesejahteraan dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan, meningkatkan kepuasan masyarakat penerima manfaat.
5. Konsep "next generation" juga mencakup kemampuan aplikasi untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam kebutuhan kesejahteraan sosial serta perkembangan teknologi di masa mendatang. Aplikasi ini dirancang untuk dapat ditingkatkan dan diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru dalam teknologi informasi.

Secara keseluruhan, "next generation" pada aplikasi SIKS-NG mencerminkan komitmen untuk memanfaatkan teknologi canggih guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas.

Sebelum adanya aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), proses manajemen dan pengelolaan data kesejahteraan sosial umumnya dilakukan secara manual atau menggunakan sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik. Adapun beberapa hal yang terjadi sebelum adanya aplikasi ini yaitu:

1. Pengelolaan Data Manual

Data mengenai penerima manfaat, jenis bantuan, dan kondisi kesejahteraan masyarakat diinput dan dikelola secara manual dalam bentuk dokumen fisik atau basis data sederhana.

2. Keterbatasan Integrasi Sistem

Sistem informasi yang digunakan mungkin tidak terintegrasi secara baik antara berbagai level atau unit di dalam organisasi atau antarlembaga terkait, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaporan menjadi kurang efisien.

3. Keterbatasan Akses Informasi

Akses terhadap informasi mengenai kesejahteraan sosial mungkin terbatas, sehingga pengambilan keputusan dalam memberikan bantuan atau layanan sosial bisa kurang tepat dan efektif.

4. Kurangnya Analisis Data

Kemampuan untuk menganalisis data secara mendalam untuk mendukung kebijakan publik atau program-program kesejahteraan sosial masih terbatas karena keterbatasan teknologi dan sistem informasi yang digunakan.

Dengan adanya aplikasi SIKS-NG, diharapkan proses manajemen dan pengelolaan data kesejahteraan sosial dapat lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Aplikasi ini memungkinkan untuk pengumpulan data yang lebih akurat, analisis yang lebih mendalam, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.2 Tinjauan tentang Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai banyak dimensi dan perumusan definisi kemiskinan merupakan sesuatu yang problematic pada tataran konsep maupun praktis tentang siapa yang dianggap penduduk miskin, serta banyak hal tentang kehidupan masyarakat miskin bahwa mereka memiliki akses pasar dan kualitas infrastruktur yang terbatas (Abhijit Banerjee, 2019).

Teori Sosial Demokrat menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan individu tapi juga persoalan struktural. Kemiskinan dapat terjadi karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini mengutamakan pada pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar bagi seluruh warganya. Dalam teori ini kapitalis masih dipandang sebagai bentuk organisasi ekonomi yang paling efektif. Meskipun dalam teori ini tidak sepenuhnya setuju terhadap adanya pasar bebas. Teori ini menjunjung tinggi kesetaraan yang menjadi prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Tercapainya kebebasan jika setiap orang memiliki kesejahteraan. Kebebasan dari pengaruh luar serta kebebasan menentukan pilihan. (Windia, 2015).

Menurut BPS (2022) kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan ialah menggunakan garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang dihitung dalam 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan merupakan dihitung dari kebutuhan minuman untuk sandang, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan lainnya.

Menurut Suwardi (2014), kemiskinan disebabkan oleh dua hal antara lain pertama kemiskinan disebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku Masyarakat atau seseorang yaitu :

- 1 Keterbatasan sumber daya modal, keterbatasan sumber daya manusia yang dapat diartikan kualitas sumber daya manusia misalnya keterampilan, Pendidikan dan pengetahuan.
- 2 Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan sulit untuk dijangkau, yang mengakibatkan sulit berintegrasi dengan penduduk yang maju

Kedua yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah yang dapat dilihat dari beberapa segi aspek yaitu :

- 1 Pembangunan yang kurang memperhatikan wilayah atau Kawasan yang terpencil dan sulit dijangkau.
- 2 Kurang memperhatikan usaha maupun produk Masyarakat yang berskala kecil atau mikro ekonomi.
- 3 Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota.

2.3 Tinjauan tentang Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya, kebutuhan material, spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Menurut W.J.S Poewodarminto (2015), kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari kondisi Dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah. Gangguan masalah tersebut meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Menurut (Suharto, 2017), dengan berbagai pendapat tentang kesejahteraan terdapat konsep kesejahteraan sosial yaitu :

- a) Mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan seseorang,
- b) Sebuah kegiatan atau bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera,
- c) Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan dari perubahan sosial-ekonomi, dan menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Berikut fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh (Fahrudin, 2014) yaitu :

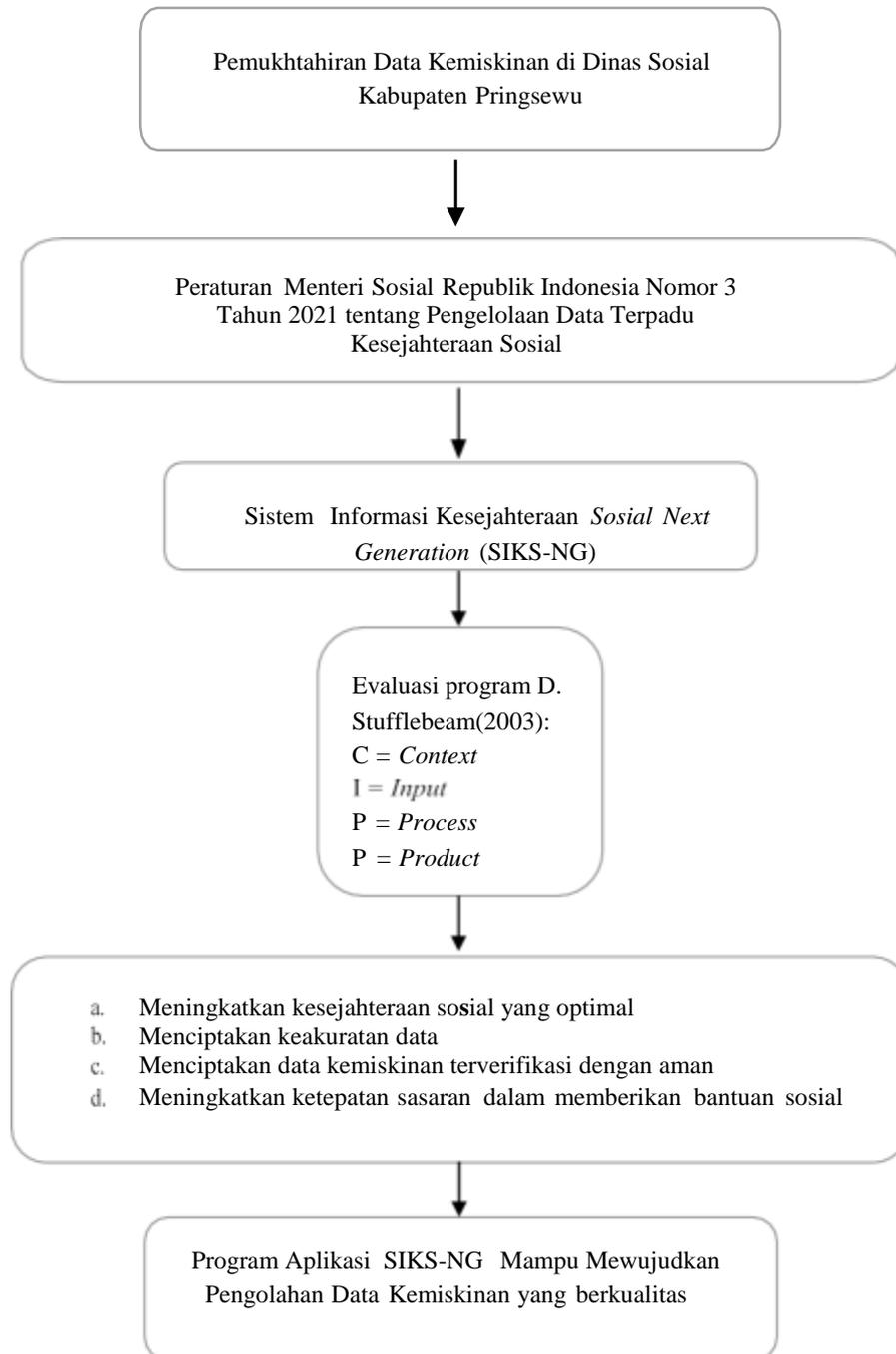
- a) Fungsi pencegahan. Dalam hal ini kesejahteraan berperan mencegah permasalahan sosial yang timbul di Masyarakat dengan menciptakan pola baru dalam hubungan sosial.
- b) Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik dan emosional dalam menghadapi suatu masalah sehingga kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.
- c) Fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial memberikan peran dalam proses pembangunan dan juga sumber daya sosial masyarakat.
- d) Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan.

Menurut (Fahrudin, 2014) tujuan utama kesejahteraan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan serta akses Pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau. Dan dalam melakukan penyesuaian diri dengan Masyarakat sekitar misalnya meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang layak,

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir ialah kerangka pemikiran yang berisi gambaran alur pemikiran penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel yang mampu memberikan penjelasan kepada pembaca terkait permasalahan yang diteliti. Adapun judul dalam penelitian ini adalah tentang Evaluasi Penerapan Program Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Dalam Kebijakan Pengelolaan Data Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah yang bagaimana proses dan kendala yang dihadapi pada penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam pengolahan data kemiskinan di Kabupaten Pringsewu.

Dengan demikian fokus utama yaitu mengevaluasi Penerapan Program Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Dalam Kebijakan Pengolahan Data Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan model evaluasi CIPP, yaitu dengan melihat bagaimana evaluasi *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. Standar evaluasi dalam hal ini mengenai kesesuaian penerapan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, kesesuaian penerapan aplikasi SIKS-NG dengan latar belakang program, komitmen instansi, kesiapan SDM, kelengkapan operasional, biaya dalam menjalankan program, proses pelaksanaan program, dan output program. Adapun kerangka berpikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang berupaya menggambarkan atau melukiskan fenomena atau kejadian secara sistematis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2017). Pendekatan penelitian kualitatif menurut Nasution (2003) pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya. Saebani (2009) terdapat beberapa pertimbangan dalam menggunakan penelitian kualitatif, diantaranya:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan langsung.
2. Metode ini menyajikan langsung secara hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian ini didesain sebagai penelitian yang bertipe deskriptif, dengan pendekatan kualitatif sebab data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah data-data yang bersifat kualitatif yang berbentuk kata dan perilaku, pengalaman personal, hasil wawancara, observasi lapangan, hasil pengamatan visual, serta skema dan gambar (Moleong, 2017). Kemudian data-data tersebut digunakan untuk menggambarkan (deskripsi) dan menguraikan fenomena yang diteliti.

3.2 Fokus Penelitian

Masalah penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif di mana fokus berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Penentuan masalah didasarkan pada tingkat kebaruan suatu informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapang). Menurut Lincoln dan Guba dalam Moloeng (2017), penentuan dasar sebuah masalah bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan.

Adapun fokus yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hasil penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Dalam Kebijakan Pengolahan Data Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu. Model evaluasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam, meliputi:

Tabel 3. Bagian yang di Evaluasi Sesuai dengan Model Evaluasi Program Menurut Stufflebeam

No.	Aspek	Uraian Langkah Evaluasi
1.	Evaluasi Konteks	Melihat dari situasi dan latar belakang yang mempengaruhi pelaksanaan program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i> (SIKS-NG).

2.	Evaluasi Input	Melihat mengenai kesiapan-kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), seperti: (a.) Komitmen Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, (b.) Kesiapan SDM, (c.) Kelengkapan pada operasional, dan (d.) Program kerja dan Standar Operasional dalam penerapan aplikasi SIKS-NG
3.	Evaluasi Proses	Melihat mengenai pelaksanaan program aplikasi SIKS-NG.
4.	Evaluasi Produk	Output yang dicapai dalam pelaksanaan program aplikasi SIKS-NG.

Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

2. Apa saja kendala yang dihadapi aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Dalam Kebijakan Pengolahan Data Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian (Moloeng, 2017) merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ialah, dilakukan pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu. Adapun lokasi ini dipilih karena Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu pemerintah daerah penyelenggara kesejahteraan sosial dan selaku pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Kabupaten.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moloeng (2017), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sesuai dengan hal tersebut, maka peneliti membagi data dalam penelitian ini menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data (Moloeng, 2017). Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari lapangan penelitian baik melalui hasil wawancara, observasi atau

pengamatan langsung di lokasi penelitian, maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dan dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yang telah dipilih.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dokumen resmi, baik cetak maupun *online* yang mendukung penelitian. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Moelong, 2017). Selain melakukan wawancara kepada narasumber, peneliti juga mengumpulkan beberapa sumber lain guna melengkapi kebutuhan informasi dengan meminta data-data kepada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang akan diteliti oleh peneliti, dalam memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2016) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan panduan wawancara secara terstruktur yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu terkait penelitian yang dilakukan. Informan yang diwawancarai adalah pihak yang memiliki keterkaitan menangani penerapan Program Aplikasi SIKS-NG Dalam Pengelola Data Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Informan	Instansi	Tanggal Wawancara
1.	Stepanus Bagus Wicaksono, S.E.	SUB Analisis Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	26 Januari 2024
2.	Afriani Puspita Rini, S.T., M.Kes.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	26 Januari 2024
3.	Rudi Susanto	Pengola data	Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	26 Januari 2024
4.	Ruli Puji Presnawan	Operator layanan SIKS-NG	Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	26 Januari 2024

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2016), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, di mana proses tersebut tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti melakukan observasi di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu sebagai upaya dalam melakukan penerapan program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang diterapkan langsung oleh operator layanan tersebut kepada masyarakat dengan cara mengamati langsung dan melihat penerapannya seperti salah satu proses verifikasi dan validasi kelayakan data terpadu kesejahteraan sosial dan mendokumentasikan kebijakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta mengamati kegiatan kantor yang sedang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016), studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian dimana data tersebut merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dalam penelitian ini berupa catatan pribadi, laporan kerja, rekaman suara, dokumentasi berupa foto dan sebagainya. Data dokumentasi yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu pada penelitian ini didapatkan secara langsung maupun *online*.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016), menjelaskan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, foto atau gambar, dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil inti sari rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder sehingga diperoleh jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data di mana menurut Sugiyono (2016), teknik keabsahan data merupakan standar validitas yang diperoleh. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak memiliki perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terdapat pada objek penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Menurut Denzin dalam Moleong (2017), membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai alat pengecekan keabsahan data atau kevaliditasan data. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik suatu derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

1. Melakukan perbandingan mengenai data hasil wawancara dan hasil observasi.
2. Membandingkan hasil pernyataan informan saat berada di depan umum dan hasil wawancara secara pribadi.
3. Membandingkan pernyataan informan ketika dalam situasi penelitian dengan yang dikatakan informan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, atau orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai penerapan aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan model evaluasi CIPP, yaitu dengan melihat bagaimana evaluasi *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product* pada aplikasi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan:
 - a. Evaluasi Konteks penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan belum sepenuhnya akurat dalam memberikan sasaran program bantuan sosial, tetapi kebijakan ini dapat membantu mengintegrasikan data supaya mendapatkan gambaran yang lebih lengkap terkait situasi kemiskinan di wilayah Kabupaten Pringsewu dengan tujuan untuk membantu dalam memantau pelaksanaan program bantuan sosial, mencatat dan menyimpan data keluarga yang dapat menerima bantuan sosial.
 - b. Evaluasi Input penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam prosedur pengolahan data kemiskinan saat ini berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan pada prosedur pengolahan data kemiskinan melalui aplikasi SIKS-NG rutin ditetapkan oleh Menteri sosial dengan jumlah alokasi keluarga penerima manfaat bantuan sosial di setiap tahunnya. Pada mekanisme prosedur pengolahan data terkait kemiskinan yang merupakan data individual yang bersifat sangat rahasia dan di lindungi oleh UU Nomor 14 Tahun 2008. Sehingga

- dalam penggunaan metodologi yang baik, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip privasi, dan melibatkan pemangku kepentingan yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial.
- c. Evaluasi Proses program aplikasi SIKS-NG dalam pengolahan data kemiskinan masih kurang baik pada akurasi verifikasi dan validasi dalam memberikan bantuan sosial sebab banyaknya data yang tidak valid dikarenakan kesalahan nomor KK dan NIK. Kendati demikian, Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu tetap berusaha dalam mengelola data kemiskinan melalui aplikasi SIKS-NG dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat memastikan kualitas data yang dihasilkan dapat diandalkan, relevan, serta digunakan dalam mendukung sesuatu pengambilan keputusan secara efektif. Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu juga melibatkan beberapa aspek kunci dan penting untuk melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap kualitas proses pengolahan data kemiskinan, dan mengambil langkah- langkah perbaikan jika diperlukan.
- d. .Evaluasi Produk program aplikasi SIKS-NG dalam pengolahan data kemiskinan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam tingkat keakuratan pemukhtahiran data yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dengan melakukarn rapat rutin koordinasi operator aplikasi SIKS-NG dengan tujuan untuk mendapatkan data kemiskinan yang valid, mutakhir, dan tepat sasaran. Dan pada tingkat kepuasan pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu masih terdapat klien yang kurang puas dan tidak puas dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini dikarenakan kurangnya pelayanan yang cepat, kemudahan pelayanan atau penyederhanaan prosedur dan pengaksesan pada aplikasi yang hanya bisa dilakukan oleh Dinas Sosial. Sehingga, perlu ditingkatkan kualitas pada pelayanan pengolahan data aplikasi SIKS-NG.

2. Terdapat beberapa kendala pada penerapan program aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Kesulitan Teknis pada potensi kesalahan sistem seperti, bug atau *maintenance*, dan ketidakcocokan pada infrastruktur.
 - b. Kendala terkait dengan keamanan data dapat muncul seperti, risiko kebocoran atau akses yang tidak sah yang dapat membahayakan integritas informasi
 - c. Keterbatasan anggaran, personel atau infrastruktur dapat menjadi kendala yang serius dalam pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan aplikasi SIKS-NG.
 - d. Kualitas data yang buruk atau tidak akurat yang menyebabkan analisis tidak tepat, sehingga menjadi kendala dalam efektivitas aplikasi SIKS-NG untuk mendukung kebijakan data kemiskinan.

5.2 Saran

Pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai penerapan aplikasi SIKS-NG dalam kebijakan pengolahan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, peneliti memberikan sedikit saran atau masukan penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Sosial mampu melakukan pemantauan secara berkala terhadap performa dan efektifitas aplikasi untuk memastikan bahwa standar kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan harapan yang mencakup aspek kecepatan respon, ketersediaan layanan dan informasi yang disampaikan.
2. Operator layanan aplikasi SIK-NG dapat menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk mengukur kinerja pada aplikasi SIKS-NG. Sehingga, dengan adanya pemantauan yang baik dapat lebih mudah mendeteksi masalah dan memberikan solusi secara cepat dan dapat melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan ketepatan dari informasi yang tersimpan.

3. Menyediakan pelatihan dan dukungan teknis kepada pengguna aplikasi SIKS-NG untuk dapat melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk dapat memperbaiki bug, meningkatkan keamanan dan memperkenalkan fitur baru supaya aplikasi dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. 2021. Optimasi SIKS-NG di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 3. No. 9
- Adi, Fahrudin. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama
- Adjadan, S. 2015. Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (Studi Evaluatif Pascadiklat di LPMP Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Evaluasi Pendidikan*. Vol 17, No. 3.
- Afifuddin and B. A. Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azmi Zuam Anisasari. 2021. Skripsi: Bentuk Komunikasi Pemerintah Desa Donokerto dalam Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembagunan Masyarakat Desa), hal. 1. diakses pada 23 Juni 2023.
- Banerjee, G., Chattopadhyay. 2019. Vanillin Biotechnology: The Perspectives and Future. *J. Sci. Food Agric*.
- Cardoso, G., Carr, D. D., & Rogers. P. 2019. Does Corporate Governance Mttter For Stock Return Volatility In The Brazilian Context?. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*.
- Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I. *Dasar-dasar Manajemen, Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi secara Efektif dan Efisien*. (Medan: Perdana Publishing, 2016).

- Denzin & Lincoln. 2000. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publication, Inc.
- Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. (Peny: Muhadjir Darwin).
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edi Suharto. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eko Budi. 2012. *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Farida Yusuf Tayibnapi. M.Pd., *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008).
- Haromin. 2022. Efektifitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengelola Data Kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal Jisipol*. Vol. 6, No. 3.
- Hidayah. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Program Ibu Mandiri Prima Dalam Pemberdayaan Perekonomian Kaum Perempuan di Yayasan Sahabat Ibu Yogyakarta*. UNY.
- Husri. 2021. Efektifitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Akademik*. Vol. 2, No. 6.
- Heri Risal Bungkaes dkk. 2013. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. (Journal ACTA DIURNA), Hal.6.
- Inu Kencana Syafie. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Intan Fitri Meutia. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Intan Fitri Meutia. 2017. *Reformasi Administrasi Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

- Josef Papilaya. 2020. Kebijakan Publik dalam Pengetasan Kemiskinan. (kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan <https://ojs.unpatti.ac.id> > bkt > article > download). Diakses pada 23 Juni 2023.
- Muhammad Rifa'i. 2023. Efektifitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berbasis Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol. 11, No. 1.
- Munthe. 2015. Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. Tangerang: FIP Universitas Pelita Harapan.
- Mulyadi. 2017. Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung). Tarsito. *Library. Fis. Uny. Ac.Id/Opac/Index.Php*.
- Noverman Djuadji. 2013. Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teori dan Ploblema Pelayanan Publik). Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Poerdarminta, W.J.S. 2015. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahmat Santa. 2024. Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS. *Jurnal Sosial dan Teknologi*. Vol. 4, No. 2.
- Sahya Anggara. Ilmu Administrasi Negara (Kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan Good Governance). (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
- Sawitri. 2007. Evaluasi Program Pelatihan Ketrampilan Membuat Hiasan Busana Dengan Teknik Pemasangan Payet Bagi Pemilik dan Karyawan Modiste di Kecamatan Gunungpati Semarang. Yogyakarta: PPs UNY.
- Sitepu Anwar and Togiartua Nainggolan. 2019. Pengelolaan & Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. *Sosio Konsepsia* Vol. 8. No. 02.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. rev.ed Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses dan Analisis Kebijakan* (Yogyakarta : Penerbit Ombak).
- Suwardi. A. 2014. Pengeluaran Pemerintahan Daerah, Produktifitas Pertanian dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 12. No. 1.
- Stufflebeam, D.L. 2003. The CIPP Model for Evaluation the Article Presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network OPEN.
- Tiana Sulistyarini. 2020. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponogoro Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Psenanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponogoro Provinsi Jawa Timur.
- Windia. 2015. Sekali Lagi Tentang Pengentasan Kemiskinan di Bali. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol. 11, No.1.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Bandung: Raja Grafindo Persada. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Whaley dan Wong's. 1994. *Nursing Care of Infant and Children, Fifth Edition*, Mosby Year Book, Missouri.
- Yeni Andriani. 2023. Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengelola Data Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*. Vol. 11, No. 2.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu..
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin